

ISSN. 2460-0318

Prosiding

Seminar Nasional

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I

**"MEMPERKUAT NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN
MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015"**

Ponorogo, 30 Mei 2015



Diselenggarakan atas Kerjasama:

**Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

dengan

**Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3Kni)
Wilayah Jawa Timur**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN I**

Tahun I, Juni 2015

"Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015"

ISSN. 2460-0318

EDITORIAL

Penanggungjawab:

Dr. Bambang Harmanto, M.Pd.

Penyunting:

Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.

Drs. Sulton, M.Si.

Drs. Sunarto, M.Si.

Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd.

Layout Setting:

Ahmad Wahid Zariat

Ismail

Penerbit:

Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Daftar Isi

		Halaman
	Halaman Sampul	i
	Editorial	ii
	Susunan Kepanitiaan	iii
	Kata Pengantar	iv
	Sambutan Ketua Umum BPP AP3KnI	v
	Sambutan Dekan	vi
	Daftar Isi	vii
1	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENCERDASAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER PANCASILA: MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (Udin S. Winataputra, Ketua Umum BPP AP3KnI, Universitas Terbuka Jakarta)	1 – 19
2	PENGUATAN NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN MEMASUKI MEA 2015 DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI BAHASA (Bambang Harmanto, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	20 – 25
3	PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (BELAJAR DAN NAPAK TILAS GAGASAN BESAR KI HAJAR DEWANTARA DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KEINDONESIAAN) (Nurul Zuriah, Ketua BPW AP3KnI Wilayah Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang)	26 – 40
4	MELAHIRKAN KEMBALI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI PENGEMBANG KARAKTER LUHUR DAN RASA KEBANGSAAN MANUSIA INDONESIA (Nur Wahyu Rochmadi, Universitas Negeri Malang)	41 – 53
5	PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI (Suciati, Universitas Kanjuruhan Malang)	54 – 57
6	PENDIDIKAN BUDI PEKERTI (ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN PESERTA DIDIK) (Kustomo, STKIP PGRI Jombang)	58 – 66
7	PERANAN SOSIAL MEDIA UNTUK MENINGKATKAN NASIONALISME DALAM MENGHADAPI MEA 2015 (Siska Diana Sari, IKIP PGRI Madiun)	67 – 77
8	BERKARAKTER LEWAT KEARIFAN LOKAL PESANTREN (STUDI INTERNALISASI NILAI TOLERANSI PADA SISWA MULTIKULTURAL DI SMA ISLAM SUNAN GUNUNG JATI NGUNUT, TULUNGAGUNG) (Muhamad Abdul Roziq Asrori, STKIP PGRI Tulungagung)	78 – 88
9	PENDIDIKAN KARAKTER BERKELANJUTAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (Ratna Yulianti dan Ardhana Januar Mahardhani, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	89 – 95

10	PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENYIAPKAN LULUSAN LPTK MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Indriyana Dwi Mustikarini, IKIP PGRI Madiun)	96 - 103
11	PENDIDIKAN NILAI KARAKTER (SIAGA BENCANA) UNTUK MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN (Badruli Martati, Universitas Muhammadiyah Surabaya)	104 - 112
12	METODE PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI 1 GALUR BROSOT KULON PROGO TAHUN PELAJARAN 2013-2014 (Sumaryati, Universitas Ahmad Dahlan)	113 - 126
13	OTENTISITAS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI TATA NILAI KEINDONESIAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Yogi Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	127 - 134
14	PENGUATAN KEINDONESIAAN DALAM PEMBELAJARAN PKn SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER (Muh Zainul Arifin, STKIP PGRI Ponorogo)	135 - 142
15	PENGEMBANGAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN HOLISTIK (Ajar Dirgantoro, STKIP PGRI Tulungagung)	143 - 153
16	PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (PT) SEBUAH BEST PRACTICE (Felisia Purnawanti, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	154 - 160
17	PEMBELAJARAN KESANTUAN BERBAHASA INDONESIA BERBASIS NILAI DASA DHARMA PRAMUKA SEBAGAI UPAYA PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH (Mukhamad Hermanto, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	161 - 165
18	PENGUNAAN MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR BERBASIS KARAKTER DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Arum Yuliani, SMKN 1 Magetan)	166 - 182
19	PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SD KABUPATEN PONOROGO (STUDI DI SDN 1 POLOREJO) (Hadi Cahyono, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	183 - 195
20	KAJIAN TENTANG NILAI BUDAYA MASYARAKAT ADAT UNTUK MEMPERKUAT MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DESA CANGKUANG KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT JAWA BARAT) (Dikdik Baehaqi Arif, Universitas Ahmad Dahlan)	196 - 210
21	PENERAPAN METODE SIMULASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Sri Winarningsih, SMKN 1 Magetan)	211 - 219
22	MEMBANGUN KARAKTER SISWA KREATIF MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ENE DALAM PEMBELAJARAN MENULIS (Erwin Mulyo Pambudi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	220 - 233

23	INTERNALISASI DAN PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DALAM SATUAN PENDIDIKAN (Yepi Sedya Purwananti, STKIP PGRI Tulungagung)	234 - 240
24	IMPLEMENTASI INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PKN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Mohammad Iskak, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	241 - 250
25	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP PERILAKU SISWA DI SDMT PONOROGO (Slamet Riyadi dan Ambiro Puji Asmaroini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	251 - 257
26	PENGLOLAAN PEMBELAJARAN DENGAN MODEL TUTOR SEBAYA GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS LAPORAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Susilo Purwantono, SMK Negeri 1 Magetan)	258 - 273
27	COOPERATIVE LEARNING DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI PROGRAM STUDI PPKn UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG (Muhertatik, Universitas Kanjuruhan Malang)	274 - 286
28	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Triwahyuningsih, Universitas Ahmad Dahlan)	287 - 296
29	PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN KEWIRUSAHAAN (STUDI KASUS DI STKIP PGRI LAMONGAN) (Ahmad Sidi, Hadi Suryanto, dan Yayuk Chayatun Machsunah, STKIP PGRI Lamongan)	297 - 306
30	PENGUNAAN METODE PICU-PACU DENGAN TEKNIK MEMBERI PENGUATAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA (Ani Mukolijah, SMK Negeri 1 Magetan)	307 - 320
31	MENDONGENG UNTUK MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK USIA DINI (Dian Kristiana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	321 - 329
32	Peran Serta Pemuda Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (Susi Sugiyarsih, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon)	330 - 336

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Triwahyuningsih

Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Bentuk partisipasi pembangunan warga negara dalam menghadapi Era Masyarakat ekonomi ASEAN adalah dengan pendidikan karakter. Penguatan ideology Pancasila sebagai Pendidikan karakter dimaksudkan membekali seluruh warga bangsa Indonesia menguatkan, meneguhkan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai warga bangsa Indonesia haruslah Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa; 2. Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa; 4. Bangsa yang demokratis dan menjunjung hukum dan hak asasi Manusia; 5. Bangsa yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Sebagai individu harus memegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai acuan Pendidikan karakter, yang meliputi karakter yang bersumber dari olah hati, karakter yang bersumber dari olah pikir, karakter yang bersumber dari olah raga/kinestika, dan karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa. Pada akhirnya terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek" yang akan mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kata kunci : Ideology Pancasila, Pendidikan Karakter, Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pendahuluan

Pada awalnya ASEAN dibentuk dengan semangat melawan bahaya komunisme. Maka ketika terjadi de-ideologisasi di tingkat global dan regional awal 1990 an, sempat muncul tentang relevansi ASEAN. Namun dalam perkembangan dan kenyataannya, kebutuhan untuk meningkatkan peran ASEAN justru bertambah. Bahkan negara seperti Vietnam, Cambodia dan Laos, yang sebelumnya secara ideologis dianggap berseberangan, kini menjadi bagian integral ASEAN.

Tuntutan kerjasama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan akhirnya menjadi kesepakatan bersama

mengintegrasikan ekonomi ASEAN 2015. Pada awal terbentuknya ASEAN merupakan suatu kerjasama regional yang didirikan oleh lima negara Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) pada tahun 1967, berdasarkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Dalam perkembangannya, anggota ASEAN mengalami perluasan yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Cambodia (1999). Salah satu butir kesepakatan dalam Deklarasi Bangkok adalah "akan lebih mengedepankan kerjasama ekonomi dan social sebagai perwujudan dari solidaritas ASEAN. Dengan demikian secara sadar ASEAN telah memilih *economic road toward peace*, berdasarkan asumsi bahwa jika negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran, maka perdamaian akan terwujud di kawasan ini. (Luhulima, 2008 : 1-2)

Sebenarnya cita-cita ASEAN untuk membentuk satu komunitas Asia Tenggara yang "saling peduli dan berbagi" dalam membangun "*an ASEAN community of caring societies*" sudah dilontarkan di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang kemudian dikenal dengan "ASEAN Vision 2020". Namun baru pada 7 Oktober 2003, melalui *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II) yang dihasilkan pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-9, di Bali, memproklamkan pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan (*ASEAN Security Community-ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC*).

Dalam konteks komunitas ekonomi, ingin dicapai ASEAN 2020 yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, di mana akan ada aliran barang, jasa dan investasi yang bebas. Dengan aliran modal lebih bebas akan menjadikannya lebih kuat, dinamis, dan komparatif secara ekonomi dalam pasar global. Dalam konteks komunitas keamanan yang ingin dicapai, ASEAN akan menyelesaikan perbedaan di antara anggotanya bukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman penggunaan kekerasan. Sedangkan dalam konteks komunitas sosial-budaya yang ingin dicapai, ASEAN akan membangun masyarakat yang peduli (*building a community of caring societies*). (Luhulima, 2008 : 7-8).

Pada ASEAN Summit Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN setuju untuk mempercepat integrasi perekonomian dan membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) menjadi tahun 2015, MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Dengan demikian MEA merupakan suatu area yang sangat kompetitif, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang mampu berintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Untuk mencapai tujuan tersebut, cetak biru (*blue print*) MEA diluncurkan pada KTT ASEAN ke 13 di Singapura 2007 untuk peta jalan (*road map*) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MEA 2015.

Terminologi komunitas merujuk pada pengertian nilai-nilai bersama, norma-norma dan symbol-simbol yang memberi identitas atau perasaan kekitaan (*sense of we-ness*) atau "pembangunan perasaan kekitaan". Komunitas dijabarkan berdasarkan rumusan *community building*, di mana kita percaya bahwa komunitas adalah suatu hal mengenai orang-orang (*people*) dan pembangunan

komunitas merupakan proses pembentukan suatu kondisi pemikiran (*state of mind*). Keterikatan yang diwujudkan bukan diantara badan atau institusi, perjanjian atau prosedur tetapi suatu komitmen, perasaan saling menjaga dan saling berbagi, perasaan saling berpartisipasi dan berbagi kepemilikan, perasaan saling memiliki dan keterikatan atau perasaan sebagai satu komunitas. Namun di sisi lain Asia Tenggara bersatu harus dikembangkan hanya dengan mengakui dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman anggotanya dan bukan dengan mencoba menjadikan Asia Tenggara sebagai "*melting pot*", di mana identitas masing-masing negara dilenyapkan. (Luhulima, 2008 : 22-24).

Oleh karena itu masing-masing bangsa tetap menjaga "jati diri" atau secara umum menjaga karakter bangsa, sebab karakter bangsa adalah kualitas jati diri bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN bangsa dan negara Indonesia harus tetap kokoh pada jati diri atau kepribadian bangsa yang tidak lain bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bangsa yang tidak kokoh membangun jati diri atau karakternya akan menjadi budak bangsa lain, ia akan terpinggirkan dari peradaban sejarah dan bangsa itu akan punah (Puruhito, 2011 : 53). Di sinilah relevansinya menguatkan ideology Pancasila sebagai Pendidikan karakter dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*.

Penguatan ideology Pancasila

Menurut John Gardner 1992 dalam (Yudi Latif, 2012 : 2) Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideology nasional, dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. (Yudi Latif, 2012: 41).

Pancasila sebagai ideology negara, adalah pandangan kolektivitas yang perumusannya terletak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

...." maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ideologi sempurna adalah cita-cita hidup mapan sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa bagi manusia atau bangsa, dan juga ideology merupakan pedoman dan petunjuk hidup berkepribadian dan hidup kesosialan-nya. Bagi negara, ideology merupakan sumber pandangan filsafat yang akan memancarkan sinarnya ke seluruh perlengkapan Negara, ke seluruh kehidupan masyarakat dan ke seluruh rakyat dan warga negaranya.

Secara filosofis ada tiga pilar utama untuk mengaktualisasikan Pancasila agar resisten terhadap arus global, yaitu : tegaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tegaknya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (pemerataan kesejahteraan social), tegaknya suatu sikap jiwa yang nasionalistik, harga dirinya, kepribadiannya, dan tekad ketidaktergantungannya kepada bangsa lain (mandiri). Negara ini akan tetap menjadi negara besar dan bersatu manakala seluruh komponen bangsanya menjadikan Pancasila sebagai ideology bangsa. Oleh karena itu, menguatkan kembali Pancasila sebagai living ideology merupakan sebuah keharusan (Nur Syam, 2011: 63)

Dalam pidatonya di PBB, pada 30 September 1960, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi keberlangsungan bangsa: "Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Yudi Latif, 2012 : 42).

Selanjutnya Yudi Latif (2012 : 42-46) mendiskripsikan tentang pokok-pokok moralitas dan hraluan kebangsaan-kenegaraan menurut Pancasila, yaitu **Pertama**, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertical-transendental) sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kedua, menurut alam pikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat social manusi (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etka-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia dikembangkan melalui jalan internalisasi dan eksternalisasi. Dengan eksternalisasi, bangsa Indonesia menggunakan kekuatan yang dimilikinya secara bebas dan aktif untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sedangkan secara internal, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga negara dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab".

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keberagaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhineka tunggal ika"

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam pergulatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka 'musyawarah mufakat'. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didekte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberative dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan terpenuhi sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Dalam keadilan sosial menurut Pancasila adalah keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, penyediaan dan rekayasa sosial serta penyediaan jaminan sosial.

Ajaran yang terkandung dalam Pancasila dipuji seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang merepresentasikan demokrasi kapitalis) dengan manifesto Komunis (yang merefleksikan ideology komunis). Bahkan seorang ahli sejarah inggris, Rutgers, mengatakan, " Dari semua-negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada semua revolusi melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu (Yudi Latif, 2012 : 47).

Sekarang permasalahannya adalah bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan saling keterkaitannya satu sama lain diaktualisasikan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh perilaku warga bangsa Indonesia dijadikanlah nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai rujukan pendidikan karakter di Indonesia. Sebab karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkan kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu perilaku kehidupan orang itu. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011 : 33) penguatan ideology Pancasila itu dapat melalui :

- 1) Kebijakan negara/pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat Undang-undang Dasar sampai ke tingkat paling rendah, yaitu Peraturan daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota;
- 2) Tercermin dalam perumusan kebijakan di bidang etika dalam bentuk kode etik dan kode perilaku beserta pelembaan lembaga penegaknya; baik di lingkungan jabatan kenegaraan dan pemerintahan, Ormas, LSM, badan usaha
- 3) Dalam berbagai bentuk program dan aturan-aturan kebijakan seperti Inpres, Surat Edaran, Buku Pedoman, Juklak, Juklis dsb
- 4) Pendidikan formal dan non formal dan Komunikasi publik baik, lewat media massa maupun elektronik
- 5) Beberapa lembaga dapat melakukan kegiatan: (a) Kegiatan penelitian dan pengkajian; (b) Kegiatan penerangan, kampanye dan komunikasi; (c) Penulisan dan penerbitan buku pedoman; (d) Kegiatan pendidikan dan pengajaran; (e) Kegiatan koordinasi dan advokasi kebijakan; (f) Kegiatan pengawasan dan koordinasi pembinaan.

Pancasila dan Pendidikan Karakter di Indonesia menghadapi MEA

Menjadikan Pancasila sebagai pendidikan karakter berarti menjadikan Pancasila sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang berkualitas di masa yang akan datang. Karakter merupakan factor penentu seseorang dalam memajukan bangsanya, dalam hal ini sebagai pemimpin, baik pemimpin di lingkungan keluarga, sekolah dan negara serta pemimpin bagi dirinya sendiri.

Penting untuk disampaikan di sini bahwa dalam Sidang Pleno KTT ASEAN 2014 di Myanmar, Presiden Joko Widodo mengatakan :

"bertekad tidak membiarkan Indonesia hanya sebagai pasar terkait terbentuknya MEA, Indonesia harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global. Indonesia terbuka untuk bisnis, namun Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. (Kompas, 13 November 2014).

Untuk dapat memastikan kepentingan nasional Indonesia tidak tergadaikan atau terlibas oleh derasnya arus pasar bebas warga negara Indonesia harus dibentengi dengan pendidikan karakter yang kuat. Karakter warga negara yang kuat atau tangguh selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007), tujuan pengembangan karakter adalah untuk :

"....terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, berkembang dinamis dan berorientasi iptek"

Tujuan pengembangan pendidikan karakter tersebut di atas akan dapat mendukung terwujudnya visi pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, untuk menegakkan Trisakti (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. (Kompas 1 Desember 2014).

Dasar pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya ada di dalam nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari setiap sila yang menjadi dasar negara

Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa;
 2. Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab;
 3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. Bangsa yang demokratis dan menjunjung hukum dan hak asasi Manusia;
 5. Bangsa yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan
- (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa , 2010-2025).

Nilai-nilai karakter tersebut di atas harus tercermin dalam karakter setiap individu yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025), sebagai berikut :

- 1) *Karakter yang bersumber dari olah hati*, antara lain beriman dan bertaqwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik;
- 2) *Karakter yang bersumber dari olah pikir*, antara lain : cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi pada iptek, dan reflektif;
- 3) *Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestika*, antara lain : bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinative, kompetitif, ceria, gigih;
- 4) *Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa*, antara lain : kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, bekerja keras dan beretos kerja.

Pada bagian lain Yudi Latif (Kompas 5 Mei 2015 : 15), mengatakan bahwa:

"....para pendiri bangsa secara konsisten mengupayakan korespondensi antara empat pokok pikiran haluan negara sebagai transformasi dari nilai-nilai Pancasila berpasangan dengan urutan fungsi negara. Maka, tampaklah bahwa pokok pikiran ketiga ' negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan' berpasangan dengan fungsi ketiga negara , "mencerdaskan kehidupan bangsa". Demokrasi berdasarkan cita kerakyatan dan permusyawaratan memerlukan kepemimpinan hikmat kebijaksanaan yang meniscayakan kecerdasan bangsa.

Kecerdasan di sini tidak semata kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan multidimensional berbasis kesadaran eksistensial baik ke dalam dan ke luar. Ke dalam, manusia cerdas mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" dari alam, yang harus menemu-kenali kekhasan potensi dirinya sebagai dasar pembentuk karakter personal. Ke luar, manusia cerdas mampu mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai , sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai , sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter personal berkembang menjadi warga negara yang berkarakter baik atau buruk. Dengan kata lain, perilaku manusia adalah fungsi dari karakter

personal dan karakter kolektif. Dengan demikian proses pendidikan harus mampu melahirkan pribadi-pribadi berkarakter sekaligus menjadi warga negara (pribadi yang membangsa) yang berkarakter. (Yudi Latif, Kompas 5 Mei 2015 : 15).

Pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila sedemikian penting dalam menghadapi MEA karena kita sebagai bangsa harus mampu mewujudkan janji kemerdekaan yang telah diukir oleh para pendiri bangsa, harus mampu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya di tengah pusaran pasar bebas. Berikut saya petik kutipan dari Lee Kuan Yew :

" Satu dasawarsa terakhir ini kinerja Indonesia lumayan, ekonominya secara konsisten tumbuh antara 4 dan 6 persen. Krisis keuangan global tidak banyak mempengaruhi kinerjanya. Investasi dalam jumlah besar dari Tiongkok dan Jepang masuk tertarik oleh adanya sumber alam yang melimpah. Namun, dalam 20 sampai 30 tahun mendatang, saya tidak melihat negeri ini akan mengalami perubahan mendasar. Malaysia barangkali akan maju lebih cepat karena secara geografis negara ini lebih menyatu, sistem transportasinya lebih baik dan angkatan kerjanya lebih mempunyai motivasi. Meskipun mengalami kemajuan, ekonomi Indonesia masih mengandalkan pada sumber alam dan penduduknya masih menggantungkan pada apa yang diberikan alam dan bukan pada apa yang dapat mereka ciptakan dengan kedua tangan mereka. Melimpahnya sumber alam cenderung membuat orang malas. Ini tanah saya, Anda menginginkan yang terkandung di dalamnya? Bayar saya " Pandangan seperti itu akan menumbuhkan sikap hidup dan budaya santai, yang nantinya sulit untuk dihilangkan". (Boediono, Kompas 21 Mei 2015 : 6).

Pentingnya pendidikan karakter ini sejak awal telah disadari oleh para Pendiri negara. Keberhasilan pembangunan karakter akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa dan keberhasilan pembangunan bangsa akan menentukan keberhasilan dalam membangun negara. Pembangunan negara secara de facto dan de jure lebih cepat dan mudah bila dibanding dengan pembangunan bangsa. Jika pembangunan bangsa membutuhkan waktu lama, maka pembangunan karakter menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama lagi. Pembangunan karakter merupakan bagian dari pembangunan budaya yang dilakukan melalui proses pendidikan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu untuk menghadapi MEA dengan pasar bebasnya kita harus membangun karakter bangsa agar tidak menjadi objek semata tetapi kita harus menjadi subjek di tengah derasnya arus globalisasi dengan membentengi diri sebagai warga negara yang berkarakter Pancasila sebagaimana dijelaskan di atas. Perlu dirumuskan kembali penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur.

Menurut Dr. Ratna Megawangi, dari *Yayasan Indonesia Heritage Foundation*, Ada tiga hal yang harus mendapatkan penekanan lebih dalam Menerapkan model pendidikan karakter:

Pertama, "*Knowing the good*" bahwa untuk membentuk karakter, anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami mengapa perlu melakukan hal tersebut. Kedua, "*feeling the good*" konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Di sini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. Jika *feeling the good* ini sudah tertanam, itu akan menjadi *engine* atau

kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative. Ketiga, "*acting the good*", pada tahap ini anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang tidak akan ada artinya.

Melakukan sesuatu yang baik harus dilatih sehingga akan merupakan/menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketiga hal di atas harus dilatih secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jadi konsep yang dibangun adalah: "*Habid of the mind, habid of the heart, habid of the hand.*" (Triwahyuningsih, 2011). Yang harus dilakukan adalah (1) *knowing the good*, seluruh warga bangsa tidak hanya tahu tentang hal-hal baik yang ada dalam nilai-nilai Pancasila tetapi mereka harus paham mengapa melakukan itu; (2) *feeling the good*, membangkitkan rasa cinta seluruh warga bangsa untuk melakukan hal-hal yang baik, dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan; (3) *acting the good*, akhirnya seluruh warga bangsa dilatih untuk berbuat mulia, berbuat sesuatu yang baik harus dilatih.

Penutup

Untuk dapat memastikan kepentingan nasional Indonesia tidak tergadaikan atau terlibas oleh derasnya arus pasar bebas seluruh warga bangsa Indonesia harus dibentengi dengan pendidikan karakter yang kuat. Karakter warga negara yang kuat atau tangguh selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007), yaitu: "...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek"

Daftar Pustaka

- Boediono. Kompas 21 Mei 2015. *Indonesia di Mata Lee Kuan Yew*.
 CPF. Luhulima. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN* 2015. Jogjakarta-Jakarta : kerjasama Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI
 Jimly Asshiddiqie. 2011. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah UUD RI 1945*. Makalah kongres Pancasila III. UNAIR. 30 Mei-1 Juni 2011.
 Kementrian pendidikan nasional.(2010). *Grand Design Pendidikan Karakter*. Jakarta: badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
 Nur Syam. 2011. *Pancasila sebagai living Ideology*. Makalah Kongres Pancasila III. UNAIR. 30 Mei-1 Juni 2011
 Puruhito. 2011. *Revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila: upaya Pendidikan Karakter bangsa*. Makalah Kongres Pancasila III. UNAIR. 30 Mei-1 Juni 2011.
 Triwahyuningsih. 2011. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Makalah kongres Pancasila III. UNAIR. 30-1 Juni 2011

- Yudi Latif.2012. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Yudi Latif. Kompas 5 Mei 2015. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*.
Kompas, 13 November 2014.
Kompas 1 Desember 2014